

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara demokratis pada dasarnya ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap sistem politik dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menuntut aktor-aktor negara untuk melakukan sebuah kebijaksanaan seperti halnya pembangunan. Pengertian pembangunan secara umum sedikit sekali memberikan kepuasan kepada semua pihak sebagaimana dikatakan oleh Black, "*Development is such term. It has no precise meaning, no generally accepted definition*". Namun walaupun tidak terdapat definisi yang pasti mengenai kata 'pembangunan', menurut Tjokroaminoto dan Mustofadidjaja sekurangnya terdapat hakikat pembangunan yaitu sebuah perubahan yang mengarah pada kondisi yang lebih baik.¹ Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan agar suatu kondisi mengalami perubahan ke arah yang lebih positif.

Berbicara mengenai konsep pembangunan secara tunggal rasanya kurang memberikan arah bagi kita apa sebenarnya variabel terikat dalam konsep 'pembangunan'. Oleh karena itu kata pembangunan biasanya selalu diikuti oleh politik, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain. Hal ini dikarenakan hakikat pembangunan yakni sebagai upaya ke arah yang lebih baik sehingga perlu diketahui pembangunan dalam hal apa yang dimaksud, apakah itu pembangunan politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

¹ Ika Sartika (dkk), 2015, Teori Pembangunan dan Implikasinya di Indonesia. Jatinangor: Pustaka Rahmat hal:1

Adapun pengertian dari pembangunan merupakan sebagai sebuah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju sebuah modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).² Jika ditelaah kembali, definisi tersebut mengarah pada pembangunan politik. Kata politik sendiri dalam Miriam Budiardjo (2008:14) pada dasarnya mengarah pada kekuasaan (*power*) pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*). Keempat konsep tersebut tidak akan terlepas dari peran negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah dalam konsep pembangunan memiliki kewajiban dalam mengubah suatu keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan mengalokasikan berbagai sumber daya yang tersedia dan berupaya meningkatkan kualitas hidup negara, daerah dan juga desa yang mana membutuhkan pembangunan bersifat fisik dan nonfisik.³

Pemahaman konsep pembangunan tidak bisa terpaku pada satu aspek saja seperti aspek politik, ekonomi dan lainnya karena walaupun pembangunan ditujukan pada aspek ekonomi misalnya, pastinya terdapat otoritas dan kekuasaan yang memainkan peran disitu. Begitupun sebaliknya, ketika pemegang legitimasi (negara dan pemerintah) melaksanakan pembangunan, maka mereka tidak hanya berada pada lingkup politik melainkan mereka juga akan memasuki lingkup ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 2 mengenai

² Harun Umar, Pembangunan Politik dan Teoritis, *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 41 No. 70 Hlm.2

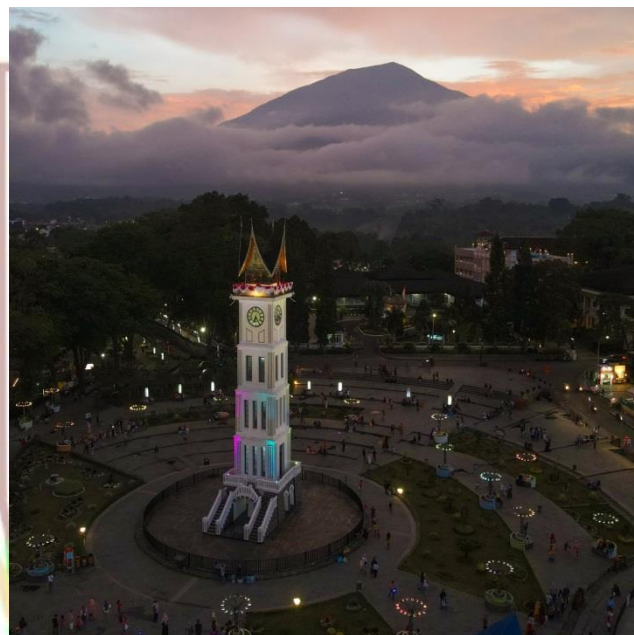
³ ibid

Pembangunan Nasional yang berbunyi *"Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara."*

Tujuan bernegara dalam konsep pembangunan sendiri juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat) dimana terdapat 4 (empat) tujuan, yaitu ; Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga dalam dasar negara aspek-aspek pembangunan khususnya yang merujuk pada tujuan bernegara mencakup segala aspek kehidupan baik ekonomi (kesejahteraan umum), sosial, budaya dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai fenomena pembangunan, terdapat sebuah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan ekonomi yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat di awal tahun 2021. Jika dilihat secara geostrategis, Kota Bukittinggi merupakan salah satu ikon di Provinsi Sumatera Barat yang sering dikunjungi wisatawan karena potensi yang dimiliki di bidang wisata cukup besar. Bukittinggi bertajuk Kota Wisata ini memberikan potensi bagi pemerintah untuk mengembangkan sebuah pembangunan melalui pendekatan ekonomi. Potensi pembangunan bersumber dari adanya daya tarik yang dimiliki kota yaitu Monumen Jam Gadang yang terletak di pusat Kota Bukittinggi. Jam Gadang dianggap sebagai patokan titik sentral (titik nol) Kota Bukittinggi yang dipenuhi berbagai aktivitas ekonomi seperti pasar dan sarana rekreasi sehingga

menjadikan kota ini sebagai pusat kegiatan ekonomi salah satunya yang paling besar yakni perdagangan. Perdagangan kota ini berada di sebuah pasar bernama Pasar Atas yang lokasinya yang sangat dekat dengan ikon kota, yaitu Jam Gadang. Dengan melihat Jam Gadang sebagai daya tarik wisata, maka Pemerintah Kota Bukittinggi memanfaatkan ikon tersebut sebagai potensi pembangunan melalui pendekatan ekonomi.



Gambar 1.1 Monumen Jam Gadang

Sumber: data sekunder diperoleh melalui <https://www.indonesia.travel/id/id/ide-liburan/3-hal-yang-wajib-dilakukan-saat-wisata-di-jam-gadang-bukittinggi>

Berdasarkan gambar diatas, posisi Monumen Jam Gadang dikelilingi oleh taman-taman sebagai tempat rekreasi dimana pengunjung juga dapat melihat langsung pesona Gunung Marapi. Pemanfaatan daya tarik Jam Gadang ini dilakukan dengan mengelola sebuah jalan yang dapat menghubungkan Jam Gadang dengan tempat wisata lainnya yakni Jalan Minangkabau. Jalan Minangkabau merupakan sebuah jalan lalu lintas yang terdapat di Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Jalan ini berada tepat di depan Taman Jam

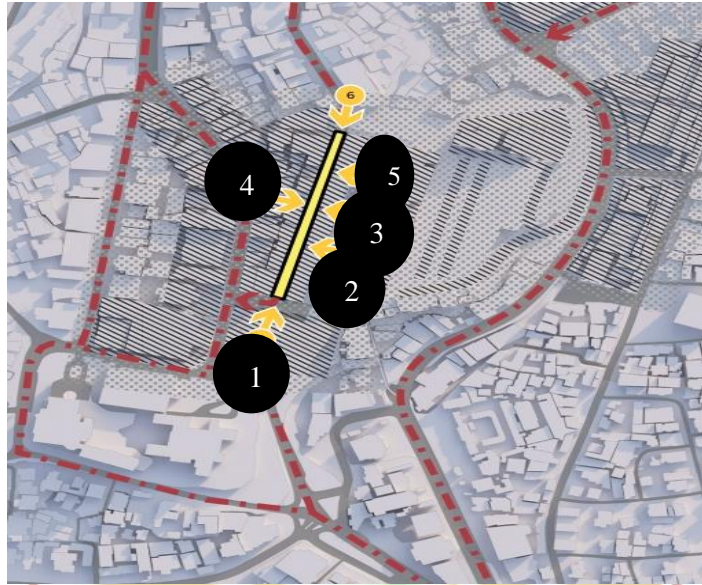
Gadang yang terdiri dari berbagai pertokoan dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjajar dari ujung ke ujung jalan tersebut.



Gambar 1.2 Jalan Minangkabau

Sumber: data sekunder diperoleh melalui <https://www.siagaonline.com/read-2-77226-2022-06-21-pemerintahan-bukittinggi-tetap-akan-bangun-pembangunan-awning-di-jalan-minangkabau.html>

Jalan Minangkabau berada di antara dua tempat wisata yang terkenal di Kota Bukittinggi, yakni di sebelah selatan merupakan Taman Jam Gadang dan di sebelah utara merupakan Wisata Kebun Binatang sehingga jalan ini berfungsi sebagai penghubung kedua tempat wisata tersebut. Selain itu jalan ini juga menghubungkan Kawasan Jam Gadang dengan Masjid Raya Bukittinggi sebagai tempat ibadah yang sering dikunjungi masyarakat. Sebagai kota wisata maka Jalan Minangkabau tak akan terlepas dari adanya para (PKL) yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai sarana pemasukan ekonomi. Adapun gambaran kondisi strategis Jalan Minangkabau sebagai berikut.



Gambar 1.3 Denah Posisi Jalan Minangkabau

Sumber: *Data primer* diperoleh peneliti melalui Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Berdasarkan gambar denah diatas, terdapat sebuah koridor yaitu Jalan Minangkabau. Jalan Minangkabau tersebut ditandai dari titik nomor 1 hingga titik nomor 6. Pada titik nomor 1 merupakan akses pejalan kaki dari area Jam Gadang. Pada titik nomor 2,3 dan 5 merupakan akses pejalan kaki dari Pasar Atas. Pada titik nomor 4 merupakan akses pejalan kaki dari Jalan Ahmad Yani dan pada titik nomor 6 merupakan akses pejalan kaki dari Masjid Raya Kota Bukittinggi. Dilihat dari posisi dan letaknya, Jalan Minangkabau merupakan jalan yang cukup strategis baik bagi lalu lintas kendaraan maupun lalu lintas pejalan kaki karena jalan ini dapat menghubungkan berbagai kawasan yang sering dikunjungi oleh para wisatawan dan pejalan kaki.

Melihat bagaimana kondisi strategis Jalan Minangkabau menjadikan angin segar bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam merencanakan pembangunan melalui pendekatan ekonomi. Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya untuk

memanfaatkan keadaan tersebut dengan membangun sebuah awning di sepanjang Jalan Minangkabau dengan tujuan untuk menata ulang para PKL, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta menambah nilai estetika kota. Pembangunan ini berlandaskan kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Terdapat keterangan yang diberikan oleh Wahyu Bestari selaku Sekretaris Dinas Pasar Kota Bukittinggi sebagai berikut.

“Dimulai dari kawasan Taman Kebun Binatang, ada Masjid Raya Bukittinggi. Ketika Bus Pariwisata *didrop* di sekitar sana, mereka akan melihat sebuah bangunan awning sebagai daya tarik yang dapat menarik pengunjung. Maka kemungkinan para PKL bahkan toko-toko disana akan disinggahi. Itulah pendekatan ekonomi yang sudah kami kaji terlebih dahulu.”⁴

Berdasarkan keterangan yang diberikan Wahyu, sasaran pembangunan ini ditujukan kepada PKL di Jalan Minangkabau karena berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Bukittinggi, Martias Wanto, Jalan Minangkabau hingga saat ini belum tertata dengan baik khususnya pada saat jam operasi lalu lintas berlangsung secara aktif. Selain itu terdapat keterangan langsung yang diberikan oleh Wahyu sebagai berikut.

“Kita punya tanggungjawab untuk menata PKL. Contohnya, mereka berjualan dengan kayu. Namun kayunya terkadang memakan tempat berdagang. Kalau seandainya menggunakan pola awning, maka sekurang- kurangnya akan lebih sama rata. Sebenarnya night market nanti akan menggunakan awning. awning dan kanopi ini tak bisa disamakan. Rencana dari desain kita itu adalah awning, awning itu bentuknya tidak seperti kanopi nantinya, melainkan seperti atap-atap bertiang di Masjid Nabawi. Sedangkan pola kanopi yang menjadi bayang-bayang masyarakat saat ini yaitu seperti kanopi di Pasar Payakumbuh, tidak seperti itu.”⁵

⁴ Wahyu Bestari, Kepala Dinas Pasar Kota Bukittinggi pada 28 September 2022 pukul 13.30 WIB

⁵ ibid

Berdasarkan keterangan dari Wahyu, desain awning dan kanopi tidak bisa disamakan. Karena pada umumnya sebagian masyarakat masih ada yang menyebut awning dan ada juga yang menyebut kanopi. Adapun desain awning yang dijadikan bahan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat yakni sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 1.4 Desain Awning di Jalan Minangkabau

Sumber: data sekunder diperoleh peneliti dari Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Gambar diatas merupakan desain awning yang berada di Jalan Minangkabau. Berdasarkan keterangan dari Wahyu Bestari, awning akan dibangun dengan panjang sekitar 103 meter, lebar sekitar 7 meter serta tinggi sekitar 10-12 meter. Selain itu terdapat desain atap dengan atap meniru pada desain gonjong Rumah Gadang. Jika dilihat lebih luas lagi, sebenarnya masih banyak kondisi jalan di Kota Bukittinggi yang perlu ditata kembali. Pemerintah Kota Bukittinggi mengutamakan jalan ini dalam karena melihat kondisi jalan yang cukup strategis sebagai penghubung antara titik sentral Kota Bukittinggi (Jam Gadang) dengan kawasan wisata lainnya di kota ini. Keberhasilan dalam pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dan ketersediaan sumber daya melainkan

dalam keberhasilan pembangunan juga dipengaruhi oleh dukungan masyarakat. Pembangunan yang demokratis sejatinya berpegang pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat karena masyarakat di negara demokrasi merupakan pemegang kedaulatan.

Jika melihat bagaimana visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap program pembangunan awning ternyata menuai banyak dukungan dari sejumlah masyarakat seperti PKL dan sekelompok masyarakat yang menamai diri mereka sebagai Forum Warga Biasa (FWB) Kota Bukittinggi.⁶ Apalagi visi dan misi pembangunan tidak hanya melalui pendekatan ekonomi namun juga melalui pendekatan estetika. Namun walaupun rencana pembangunan tersebut berhasil menuai banyak dukungan dari kalangan masyarakat, rupanya terdapat perbedaan anggapan dari sebagian masyarakat. Perbedaan anggapan ini berupa ketidaknyamanan masyarakat terhadap rencana pembangunan. Ketidaknyamanan ini terlihat ketika mereka merasa program pembangunan awning memiliki dampak yang dapat mengganggu aktivitas mereka dimana ketidaknyamanan ini ditunjukkan melalui berbagai reaksi negatif di sekitar Kota Bukittinggi, salah satunya reaksi yang berasal dari sekelompok masyarakat yang disebut sebagai Serikat Jalan Minangkabau atau disingkat SJM.⁷

Serikat Jalan Minangkabau atau disingkat SJM merupakan kelompok masyarakat yang menempati toko-toko di sepanjang Jalan Minangkabau. SJM

⁶ dapat diakses melalui <https://indonesiadetik.com/sekitar-300-orang-pedagang-k5-yang-tergabung-di-dalam-forum-warga-biasa-fw-lakukan-aksi-damai-di-kantor-dprd-kota-bukittinggi/> pada 2 April 2023 pukul 19.46 WIB

⁷dapat diakses melalui <https://www.bangunpiaman.com/2022/09/aksi-damai-sjm-tolak-pembangunan-awning> pada 2 Februari 2023 pukul 19.50 WIB

awalnya sebatas simbol persatuan masyarakat berdasarkan kesamaan profesi, yakni pedagang. Namun SJM mulai memiliki eksistensi yang besar di Kota Bukittinggi semenjak adanya gejolak terhadap rencana program pembangunan awning yang berbentuk sebuah reaksi negatif berupa penolakan. Semenjak adanya polemik penolakan program pembangunan awning SJM berkembang sebagai serikat yang memiliki struktur organisasi. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Fadhli⁸:

“Serikat Jalan Minangkabau sebenarnya mulai aktif lagi semenjak adanya isu program pembangunan awning ini. Dari situlah kami membentuk struktur organisasi agar bisa menjadi wadah yang kuat dalam menolak pembangunan ini.”

Selain keterangan yang diberikan M. Fadhli, berikut merupakan struktur keorganisasian SJM.

Tabel 1.1
Kepengurusan Serikat Jalan Minangkabau (SJM)

Ketua	H. Muhammad Fadhli, S.T., M.Sc (Pemilik Toko Emas Ramino)
Wakil Ketua	H. Azwar Boy (Pemilik Toko Sinar Jelita)
Sekretaris I	Hafizh Ghaliswara, S.Psi (Pemilik Toko Emas H. Usman Manan)
Sekretaris II	Muhammad Afif, S.E (Pemilik Toko Sport Evarma)
Bendahara I	H. Ismail Ramli (Pemilik Optik Minang)
Bendahara II	David Z (Pemilik Toko Sinar Baru Elektrik)

sumber : data diolah peneliti pada tahun 2023

Berdasarkan wawancara dengan M. Fadhli, penolakan yang diberikan SJM terhadap pembangunan dikarenakan SJM merasa tidak nyaman dengan adanya bangunan awning di depan toko mereka. Bangunan awning dinilai akan mengganggu aktivitas ekonomi para pemilik toko, seperti menghalangi pengunjung melihat isi toko mereka. Selain itu dari aspek lingkungan, dikhawatirkan bangunan awning akan mengurangi intensitas cahaya matahari dan menghambat sirkulasi

⁸ Muhammad Fadhli selaku Ketua SJM, 3 Februari 2023 pukul 15.10 WIB

udara. Dari rasa ketidaknyamanan terhadap pembangunan tersebut, maka SJM menunjukkannya melalui berbagai reaksi-reaksi yang mengarah pada penolakan.



Gambar 1.5 Reaksi penolakan SJM

Sumber: data sekunder diperoleh melalui akun *facebook* Serikat Jalan Minangkabau <https://ms-my.facebook.com/sjmbkt2021/videos/>

Berdasarkan pada gambar 1.5, reaksi-reaksi yang diberikan oleh SJM sebagai penolak pembangunan rupanya membawa mereka pada perundingan yang berhadapan langsung dengan Pemerintah Kota Bukittinggi. Pihak pemerintah berupaya meluruskan kembali niat baik mereka agar tidak terjadi miskomunikasi dengan pihak SJM. Begitupun dengan pihak SJM, mereka berupaya membuat pemerintah bersikap tenggang rasa mengenai dampak dari pembangunan yang akan mereka rasakan kedepannya. Jika ditelaah kembali, perundingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak SJM merupakan sebuah hubungan timbal balik (interaksi) secara langsung yang di dalamnya melibatkan aktor pemerintah dengan masyarakat.



Gambar 1.6 Pertemuan SJM dengan Pemerintah Kota Bukittinggi
sumber: data sekunder diperoleh peneliti melalui akun facebook Serikat Jalan Minangkabau

Berdasarkan gambar 1.6, terdapat perundingan yang dihadiri oleh pemerintah kota dengan SJM. Peneliti melihat adanya konsep interaksi disini berpijak dari aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi menuai reaksi dari berbagai masyarakat khususnya reaksi yang mengundang persoalan krusial yang membawa mereka pada perundingan-perundingan. Menurut H. Bonner (dalam Santoso, 1992) interaksi dapat dipahami sebagai sebuah hubungan antara dua orang atau lebih individu manusia dimana kelakuan individu/kelompok mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu/kelompok yang lainnya. Dalam interaksi terdapat aktor yang memiliki peran masing-masing, seperti halnya negara/pemerintah dan masyarakat.

Jika melihat pada struktur kekuasaan, Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan pembuat keputusan dan masyarakat yang mematuhi keputusan tersebut, tentu memberikan potensi untuk keduanya saling memiliki hubungan, seperti halnya interaksi. Interaksi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan masyarakat bisa terjadi ketika terdapat sebuah keputusan yang dibuat Pemerintah Kota

Bukittinggi menuai tanggapan/respon masyarakat dikarenakan keputusan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Baik respon positif maupun respon negatif sebenarnya bergantung pada latar belakang dan aspek kondisional setiap masyarakat. Jika latar belakang dan aspek kondisional tidak mendukung terhadap pembangunan, maka biasanya akan memicu ketidaksesuaian antara pemerintah dengan masyarakat. Ketidaksesuaian inilah yang dapat membawa mereka pada proses interaksi. Interaksi pada dasarnya merupakan kajian dalam sosiologi yang memiliki objek kajian berupa masyarakat.

Konsep interaksi sudah pernah digunakan dalam persoalan ilmu politik sebagaimana buku yang ditulis oleh Muhlis Madani tahun 2011 yang berjudul *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Dalam buku tersebut kajian interaksi aktor digunakan dalam perumusan kebijakan publik. Namun pada penelitian ini peneliti mencoba menggunakan teori interaksi aktor dalam persoalan pembangunan yang sudah selesai pada tahap perumusan kebijakan. Kajian interaksi aktor dalam pembangunan dapat dikatakan sebagai kajian sosiologi politik, dimana terdapat fenomena-fenomena dalam masyarakat yang berada dalam aktivitas politik.

Sosiologi politik merupakan kajian interdisiplin, yakni irisan dua bidang ilmu, dimana dalam kajiannya membahas relasi antara kehidupan masyarakat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa.⁹ Selain itu dari hasil keputusan tersebut tentunya dapat menimbulkan gejala-gejala tertentu dalam masyarakat. Pentingnya kajian yang menggabungkan antara ilmu masyarakat dengan

⁹ Dewi, Susi Fitria (2017) *Sosiologi Politik* Yogyakarta: Gre Publishing . Hlm.1

ilmu politik/pemerintahan menjadikan kita tahu bahwa dalam pemerintahan, tidak hanya aktor-aktor yang berkuasa saja yang memiliki peran, melainkan masyarakat sebagai aktor yang memiliki nilai-nilai kedaulatan juga perlu diperhatikan posisi dan peranannya.

Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki hak dan kewajiban dalam mengambil keputusan, seperti halnya memutuskan sebuah pembangunan. Setiap pemimpin kota memiliki visi dan misi dalam melancarkan periode kepemimpinannya dimana visi dan misi tersebut tercantum dalam dokumen yang disebut sebagai RPJMD. Dokumen inilah yang dijadikan landasan dan pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun. Namun setiap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tentunya akan menuai reaksi dari masyarakat, khususnya masyarakat yang merasa tidak nyaman oleh pembangunan, yaitu Serikat Jalan Minangkabau.

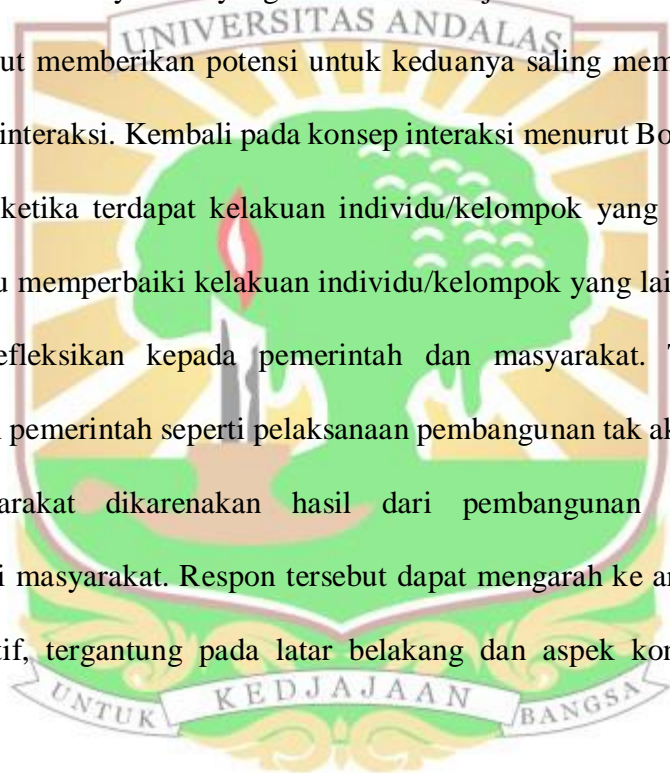
Reaksi yang menentang pembangunan inilah yang dapat dijadikan sebagai persoalan krusial dalam kajian sosiologi politik karena di dalamnya melibatkan antara negara dan pemerintah sebagai pemegang legitimasi dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan di negara demokrasi, dimana diantara keduanya terdapat ketidakserasian tujuan dan kepentingan. Kita akan melihat bagaimana terdapat dua kekuatan yang sama saling berjuang memenuhi kepentingan masing-masing. Selain itu dalam pembangunan, masyarakat pula yang di kemudian hari yang akan merasakan langsung dampak dan indikasinya. Sebagai negara yang menganut nilai-nilai demokrasi, penolakan terhadap pembangunan bukan berarti diabaikan atau dilenyapkan begitu saja, melainkan pemerintah memiliki kewajiban untuk

memberikan jalan bagi mereka untuk menuangkan suara dan keluh kesah yang dapat dilakukan dengan hubungan timbal balik (interaksi) melalui sebuah forum atau perundingan. Oleh karena itu, sesuai dengan judul penelitian, maka peneliti bertujuan untuk meneliti bagaimana bentuk interaksi aktor antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal program pembangunan awning di Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi.

Berbicara mengenai interaksi aktor, terdapat beberapa tinjauan literatur serta penelitian ilmiah yang mengangkat teori dan konsep interaksi aktor diantaranya penelitian Muhlis Madani (2016), Endriana (2022), Yanhar (2019), Mahmud dan Ardianto (2020), Sri (2022), dan Tika (2023). Dari penelitian-penelitian diatas rata-rata bentuk interaksi aktor berbentuk asosiatif atau mengarah pada penyatuan, seperti kerjasama dan dukungan, interaksi yang dikaji menggunakan prinsip Good Governance, serta membahas hambatan dalam interaksi.

Sedangkan pada penelitian saat ini, interaksi yang dibahas yakni bentuk interaksi asosiatif yang mengarah pada penyatuan dan interaksi disosiatif yakni interaksi yang mengarah pada perpecahan. Peneliti memberikan sedikit gambaran bahwa interaksi asosiatif dalam permasalahan ini rupanya tidak terlalu banyak ditemukan melainkan sebaliknya, interaksi disosiatif bersifat dominan dalam permasalahan yang diteliti. Maka dari itu peneliti mencoba mendeskripsikan bagaimana bentuk interaksi-interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat ditengah gejolak dalam pembangunan.

Menurut H. Bonner (dalam Santoso, 1992) interaksi dapat dipahami sebagai sebuah hubungan antara dua orang atau lebih individu manusia dimana kelakuan individu/kelompok mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu/kelompok yang lainnya. Dalam interaksi terdapat aktor yang memiliki peran masing-masing, seperti halnya negara/pemerintah dan masyarakat. Jika melihat pada struktur kekuasaan, terdapat pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang mematuhi kebijakan tersebut. Maka dari struktur tersebut memberikan potensi untuk keduanya saling memiliki hubungan, seperti halnya interaksi. Kembali pada konsep interaksi menurut Bonner, hubungan dapat terjalin ketika terdapat kelakuan individu/kelompok yang mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu/kelompok yang lainnya. Maka hal ini dapat terefleksikan kepada pemerintah dan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelaksanaan pembangunan tak akan terlepas dari respon masyarakat dikarenakan hasil dari pembangunan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Respon tersebut dapat mengarah ke arah yang positif maupun negatif, tergantung pada latar belakang dan aspek kondisional setiap masyarakat.



Sebelumnya peneliti sudah menjelaskan bahwa pembangunan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam ilmu politik. Namun dalam pembangunan ternyata tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, konsep pembangunan dapat berpengaruh terhadap aspek apapun, baik itu aspek politik, ekonomi sosial budaya dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti hendak meneliti interaksi aktor yang terjadi dalam pembangunan sehingga dapat dikatakan penelitian saat ini merupakan

penelitian sosiologi politik. Sosiologi Politik merupakan gabungan dari konsep sosiologi dan ilmu politik, dimana terdapat sebuah gejala-gejala dalam masyarakat yang tidak terlepas dari aspek negara, kekuasaan dan struktur pemerintahan. Pentingnya kajian yang menggabungkan antara ilmu masyarakat dengan ilmu politik/pemerintahan menjadikan kita tahu bahwa dalam pemerintahan, tidak hanya aktor-aktor yang berkuasa saja yang memainkan peran mereka, namun masyarakat sebagai aktor yang memiliki nilai-nilai kedaulatan juga perlu diperhatikan posisi dan peranannya.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi menjadikan Jalan Minangkabau sebagai wadah dalam tata kelola di bidang perekonomian. Strategi yang dilakukan Dinas Pasar yaitu menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan membangun sebuah awning di sepanjang Jalan Minangkabau berupa tonggak dan atap tempat para PKL berjualan. Pembangunan ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 yang diamanatkan pemerintah kepada Dinas Pengelolaan Pasar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, Wahyu Bestari sebagai berikut¹⁰:

“Program pembangunan ini sudah tertuang dalam APBD lalu diturunkan ke DPA dan terdapat target kinerja. Bagian perencanaan berada di dinas pasar, dan bagian berada fisiknya di Dinas Pekerjaan Umum dan realisasinya di kawasan Pasar Atas (Jalan Minangkabau).”

¹⁰ Wahyu Bestari, Kepala Dinas Pasar Kota Bukittinggi, 28 September 2022 pukul 13.45 WIB

Selain itu program pembangunan ini merupakan bentuk dari inisiasi pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Wahyu¹¹:

“Program ini didasari oleh inisiasi pemerintah dengan melihat kondisi kebutuhan). Sama seperti pikir dari dewan. Inisiasi ini melihat dari kondisi kebutuhan, disitu ada RPJM Teknokratik yang disusun berdasarkan kebutuhan dinamika masyarakat. Selain itu terdapat proses inisiasi yaitu inisiasi berawal dari pemda lalu masuk ke DPRD, sehingga masuk dalam RKPD dan sejalan dengan visi misi kota”

Berdasarkan keterangan di atas, Wahyu mengatakan bahwa rencana pembangunan ini sejalan dengan visi misi kota, dimana Kota Bukittinggi sejatinya merupakan kota wisata sehingga dapat dipahami bahwa ikon Kota Bukittinggi dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan melalui pendekatan ekonomi, yaitu dalam penataan dan penertiban para PKL. Sebagaimana keterangan diberikan oleh Wahyu Bestari¹²:

“Pembangunan ini disesuaikan dengan visi misi Kota Bukittinggi yakni melihat Kota Bukittinggi sebagai kota yang memiliki daya tarik dalam bidang wisata, sehingga kita memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan penataan melalui pendekatan ekonomi dengan membangun awning.”

Selanjutnya pemerintah sudah melakukan tahapan musrembang dengan masyarakat dan sosialisasi juga sudah dilakukan dengan para pemangku adat. Maksud pemerintah melibatkan para pemangku adat merupakan tanda bahwa pemerintah masih menghargai nilai-nilai dan falsafah Budaya Minangkabau dimana kegiatan pemerintahan juga memerlukan keterlibatan para pemangku adat sebagaimana peradaban budaya minangkabau yang saat ini masih kental di kalangan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wahyu Bestari¹³:

“Pihak pemerintah melakukan tahap pengenalan rencana pembangunan dengan beberapa pejabat sekitar dan juga kepada salah satu tokoh adat di Kota Bukittinggi yang disebut sebagai penghulu pucuk. Namun sebagai masyarakat dengan individu

¹¹ ibid

¹² ibid

¹³ ibid

yang memiliki sifat dan latarbelakang yang beragam, sangat wajar jika kami menuai pro dan kontra terhadap perencanaan pembangunan ini.”

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti melihat sudah ada interaksi yang terjadi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan tokoh adat. Namun Marfendi Maad selaku wakil wali Kota Bukittinggi mengatakan bahwa interaksi dalam bentuk sosialisasi menuai pro dan kontra dari masyarakat karena setiap masyarakat pastinya memandang pembangunan berdasarkan kepentingan masing-masing. Disamping adanya pro dan kontra dari pemangku adat setempat, penolakan yang tegas diberikan oleh SJM sehingga berbagai kecaman dari pihak SJM membawa mereka berhadapan langsung dengan pemerintah. SJM sebagai aktor penentang pembangunan menjadi pusat perhatian dalam permasalahan penelitian saat ini. Hal ini dikarenakan pertentangan yang mereka lakukan berlangsung menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum ditemukan penyelesaiannya.

Sebelumnya terdapat pertemuan antara pihak SJM dengan pihak pemerintah pada tanggal 12 Juni 2022 dimana pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Bukittinggi, Martias Wanto. Dalam pertemuan tersebut, Martias Wanto menyatakan bahwa salah satu latar belakang program pembangunan awning yaitu karena adanya ketidakteraturan yang ada di Jalan Minangkabau sehingga dengan dibangunnya awning dapat menata kembali ketidakteraturan tersebut.

Namun hal itu dibantahkan oleh pihak SJM bahwa ketidakteraturan jalan sebelumnya tidak terlalu buruk dan ketidakteraturan semakin memburuk semasa kepemimpinan Walikota Bukittinggi, Erman Safar, sehingga pembangunan awning bukanlah alasan yang logis dalam mengatasi ketidakteraturan tersebut. Selain itu, pihak SJM semakin memperkuat penolakan mereka ketika Pemerintah Kota

mengatakan bahwa Jalan Minangkabau merupakan kawasan koridor dan pedestrian, menunjukkan ketidakpahaman pemerintah mengenai definisi koridor dan pedestrian.

Hal ini dikarenakan menurut pihak SJM, Jalan Minangkabau secara fisik merupakan sebuah jalan raya dan sarana lalu lintas, bukan sebuah kawasan koridor atau pedestrian. Sampai pada akhir sosialisasi antara pihak Pemerintah Kota dengan pihak SJM, hasil interaksi kedua belah pihak pun ternyata memperkuat penolakan dari pihak SJM. Selain itu perundingan antara pihak pemerintah dengan pihak SJM yang masih mengambang semakin memicu pertentangan yang diberikan oleh pihak SJM. Tuntutan demi tuntutan dari SJM terkait pembatalan pembangunan ini nampaknya tidak diindahkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana Pemerintah Kota merealisasikan pembangunan ini dengan mulai melakukan tahapan konstruksi pada sekitar akhir bulan September.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, Serikat Jalan Minangkabau melakukan pertemuan dengan DPRD Bukittinggi. Alasan SJM mengadakan pertemuan ini karena mereka menilai bahwa DPRD dapat mengaspirasikan hak suara mereka kepada Pemerintah Kota Bukittinggi. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu program pembangunan awning pun ditunda sementara waktu dan tidak dipastikan sampai kapan waktu penundaannya. Hingga sampai saat ini proses program pembangunan awning masih dalam tahap penundaan dimana dapat dikatakan bahwa kondisi konstruksi di lapangan dinyatakan ditunda begitu saja. Pada tanggal 19 Oktober 2022 penundaan pembangunan dinyatakan melalui surat yang ditujukan kepada penghulu adat setempat, yaitu Niniak Mamak Pangka Tuo Nagari Kurai V Jorong.

Tabel 1.2
Interaksi dan Kegiatan Aktor dalam Pembangunan Awning

Waktu	Interaksi/Kegiatan	Pihak yang terlibat
12 Juni 2022	Sosialisasi pertama dari Pemerintah Kota Bukittinggi kepada SJM	Pemerintah Kota Bukittinggi dan SJM
16 Juni 2022	Sosialisasi kedua dari Pemerintah Kota Bukittinggi kepada SJM	Pemerintah Kota Bukittinggi dan SJM
14 Juli 2022	Penandatanganan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pemenang tender	Pemerintah Kota Bukittinggi dan CV. Grounding Pratama Indonesia
13 September 2022	Pertemuan SJM dengan DPRD Kota Bukittinggi	SJM, DPRD dan beberapa perwakilan Pemerintah Kota Bukittinggi
30 September 2022	Aksi damai yang dilakukan oleh SJM	SJM
1 Oktober 2022	Keributan antara SJM dengan kontraktor saat menjalankan proses konstruksi jalan.	SJM dengan kontraktor
3 Oktober 2022	Pertemuan SJM dengan DPRD dan beberapa perwakilan dari pemerintah	SJM, DPRD dan beberapa perwakilan dari pemerintah
17 Oktober 2022	Aksi <i>Long March</i> di Jalan Minangkabau	<i>Niniak Mamak Pangka Tuo Nagari</i>
19 Oktober 2022	Penundaan Pembangunan	Pemerintah Kota Bukittinggi melalui surat kepada <i>Niniak Mamak Pangka Tuo Nagari</i>

sumber: data diolah peneliti pada tahun 2022

Meninjau pada penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti melihat bahwa rata-rata interaksi aktor yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat lebih berbentuk asosiatif. Interaksi asosiatif dapat dikatakan interaksi yang mengarah pada penyatuan dan kerjasama. Namjkn berdasarkan pada tabel 1.1, bentuk interaksi yang dihasilkan dari rencana pembangunan mengarah pada pertentangan khususnya pertentangan yang berasal dari kalangan masyarakat. Oleh sebab itu maka peneliti beranggapan bahwa masih banyak fenomena mengenai pertentangan-pertentangan yang ada dalam sebuah rencana pembangunan yang dapat diteliti, salah satunya

fenomena yang terdapat di Kota Bukittinggi mengenai program pembangunan awning di Jalan Minangkabau.

Pertentangan ini terlihat ketika adanya ketidaknyamanan masyarakat terhadap pembangunan tersebut sehingga menimbulkan berbagai bentuk reaksi dan yang lebih penting yaitu membawa mereka kepada forum yang berhadapan langsung dengan pihak pemerintah untuk melakukan perundingan. Namun dalam perundingan tersebut belum ditemukan kesepakatan atau sekurang-kurangnya jalan tengah yang tidak merugikan masing-masing pihak.

Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa adanya ketidaknyamanan dan ketidakserasian masyarakat terhadap keputusan pemerintah terkait program pembangunan awning menunjukkan kepada interaksi yang berbetuk disosiatif, yaitu kebalikan dari interaksi asosiatif. Selain itu peneliti juga berasumsi bahwa terdapat hal-hal menarik yang akan ditemukan ketika pemerintah berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat.

Fenomena ini penting untuk diteliti karena melihat adanya perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat hingga membawa mereka ke dalam sebuah perundingan menjadikan kita tahu bahwa dalam lingkup ketika pemerintah melaksanakan pembangunan, tidak hanya aktor formal yang selalu memiliki peran. Sebaliknya, terdapat aktor informal seperti halnya perkumpulan masyarakat dan pemangku adat yang dapat mengambil peran walaupun sebagai pihak oposisi. Adanya forum antara aktor pemerintah dengan aktor non pemerintah ini akan menunjukkan kita bagaimana interaksi yang terjadi di dalamnya, dimana mereka saling melakukan proses timbal balik secara langsung dan tidak langsung.

Selain itu, peneliti melihat di satu sisi bahwa pemerintah merupakan pemegang kekuasaan dan di sisi lain masyarakat merupakan salah satu unsur negara yang berpijak pada landasan demokrasi, sehingga terdapat fenomena menarik yang dapat dikaji yaitu bagaimana interaksi di antara keduanya dalam menghadapi perselisihan kepentingan tersebut. Untuk melihat interaksi atau timbal balik antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat maka peneliti membedahnya menggunakan konsep interaksi aktor sebagaimana rumusan masalah yakni Bagaimana Bentuk Interaksi Aktor dalam Program Pembangunan Awning di Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti uraikan maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk interaksi aktor dalam program pembangunan awning di Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai sumbangsih pemikiran demi perkembangan pengetahuan bidang ilmu politik yang berfokus kepada interaksi aktor dalam program pembangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi instansi yang terkait dalam program pembangunan awning, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan dalam pembangunan khususnya dalam konteks interaksi aktor.

Bagi kalangan masyarakat penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan baru yang mengulas mengenai pembangunan, khususnya bagaimana interaksi-interaksi aktor yang terlibat, baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah.

